



djp

KPP PRATAMA PARE



LAPORAN KINERJA 2024

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
1. DASAR PENYUSUNAN.....	3
2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE).....	3
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	12
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PENYUSUNAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan didasarkan pada pengukuran kinerja yang objektif dan dilengkapi dengan evaluasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, laporan kinerja juga menyajikan hasil analisis yang memadai dan transparan guna memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, laporan kinerja berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam kinerja pemerintahan.

2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

a. Kondisi Geografis

- Kabupaten Kediri



Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan dan 344 desa/kelurahan yang meliputi:

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1. Badas	8	14. Pagu	13
2. Banyakan	9	15. Papar	17
3. Gampengrejo	11	16. Pare	9
4. Grogol	9	17. Plemahan	17
5. Gurah	21	18. Ploso Klaten	15
6. Kandangan	12	19. Puncu	8
7. Kandat	12	20. Purwoasri	23
8. Kayen Kidul	12	21. Ringinrejo	11
9. Kepung	10	22. Semen	12
10. Kras	16	23. Tarokan	10
11. Kunjang	12	24. Wates	18
12. Mojo	20	25. Ngancar	10
13. Ngadiluwih	16	26. Ngasem	12

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 Kabupaten dengan batas-batas: Utara: Kab. Nganjuk dan Kab. Jombang; Selatan: Kab. Blitar dan Kab. Tulungagung; Barat: Kab. Tulungagung dan Kab. Nganjuk; Timur: Kab. Jombang dan Kab. Malang.

- **Kabupaten Nganjuk**



Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan yang meliputi:

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1. Bagor	21	11. Ngluyu	6
2. Baron	11	12. Ngronggot	13
3. Berbek	19	13. Pace	18
4. Gondang	17	14. Patianrowo	11
5. Jaticalen	11	15. Prambon	14
6. Kertosono	14	16. Rejoso	24
7. Lengkong	16	17. Sawahan	9
8. Loceret	22	18. Sukomoro	12
9. Nganjuk	15	19. Tanjunganom	16
10. Ngetos	9	20. Wilangan	6

Secara geografis Kabupaten Nganjuk memiliki batas-batas; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Pada wilayah bagian timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, serta Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Wilayah KPP Pratama Pare yang meliputi 2 kabupaten dengan 46 kecamatan 628 desa tentu menjadi tantangan tersendiri. Bentangan luas wilayah seluas 2.748 km² membutuhkan sumber daya yang besar untuk dapat menjangkau keseluruhannya.

b. Kondisi Perekonomian

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk sempat terjadi penurunan tren ekonomi pada tahun 2020, lalu kembali membaik pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana grafik berikut:



Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung memberikan tekanan pada perekonomian Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Berbagai inovasi yang dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 cukup berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga berakibat pada penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP Pratama Pare yang merupakan wilayah kerjanya. Sehingga untuk mencapai target penerimaan yang ditentukan diperlukan strategi-strategi khusus yang dapat menunjang penerimaan pajak.

Adapun struktur perekonomian **Kabupaten Kediri** didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara Struktur perekonomian **Kabupaten Nganjuk** didominasi oleh: Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Real Estate.

Pada tahun 2023 sektor pajak dominan di KPP Pratama Pare meliputi: Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi dan Kegiatan Jasa Lainnya.

Pada tahun 2024 sektor pajak dominan di KPP Pratama Pare meliputi: Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi dan Konstruksi.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Nganjuk memiliki kemiripan baik dari

sektor usaha yang mendominasi maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dengan kondisi ekonomi tersebut, diharapkan mampu menunjang pencapaian penerimaan KPP Pratama Pare.

c. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung sebanyak 101 (seratus satu) pegawai (kondisi per 31 Desember 2024 termasuk KP2KP Nganjuk), dengan didominasi usia 31-50 tahun serta tingkat pendidikan setara Diploma (D-3) sampai Sarjana (S-1), menjadi tantangan tersendiri bagaimana bisa meningkatkan kemampuan *soft skill* pada bidang teknis dan manajemen, khususnya dalam penyelesaian tugas strategis yakni pengamanan penerimaan pajak.

d. Keuangan

Sumber daya keuangan KPP Pratama Pare tertuang dalam DIPA 015 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.459.651.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian untuk belanja pegawai Rp 777.362.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan belanja non-pegawai Rp 5.682.289.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 964.278.674.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) maka *collection cost* KPP Pratama Pare masih minim yaitu sebesar 0,67%.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare menyelenggarakan fungsi:

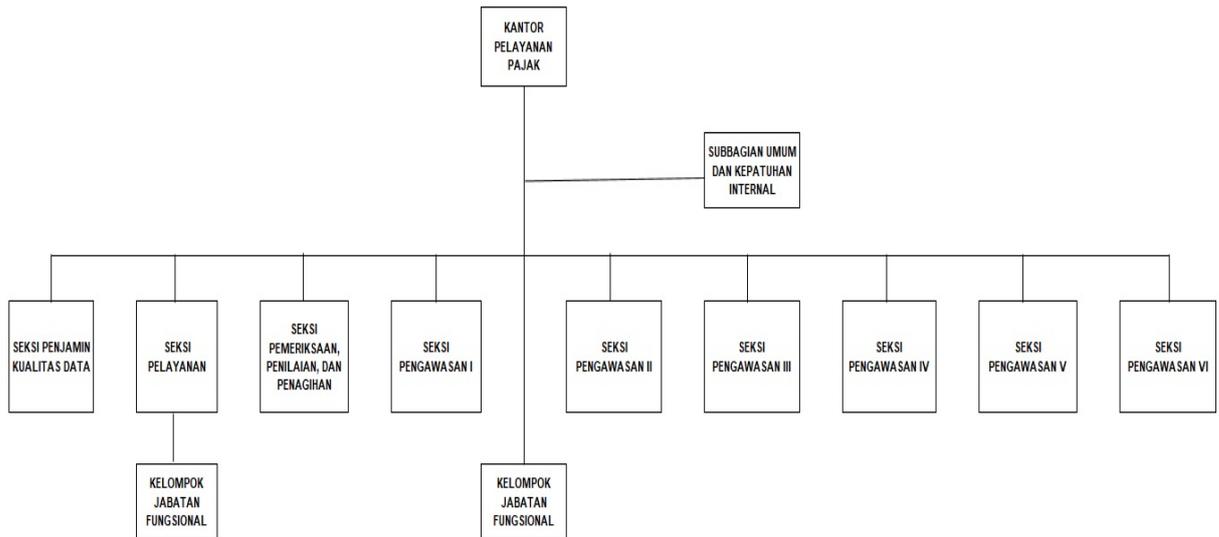
- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Pare merupakan KPP Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan organisasi KPP Pratama Pare adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi KPP Pratama Pare dipimpin oleh Kepala Kantor dengan membawahi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan 1 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan total pegawai adalah 101 orang.

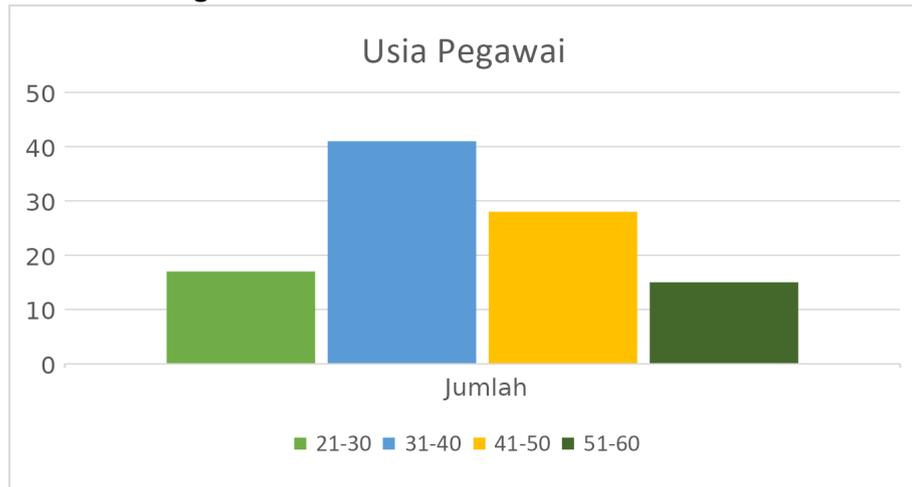
Bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi kelangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi. Data mengenai SDM mencakup berbagai informasi yang berkaitan dengan Jenjang Pendidikan, Usia dan Gender yang terdapat di KPP Pratama Pare. Data SDM tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

- **Data Jenjang Pendidikan Pegawai KPP Pratama Pare**



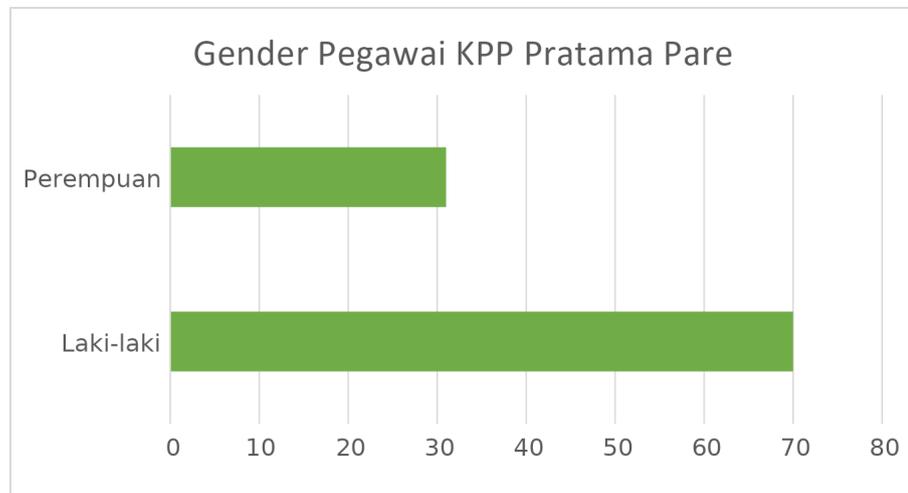
**Data per 31 Desember 2024*

- **Data Usia Pegawai KPP Pratama Pare**



**Data per 31 Desember 2024*

- **Data Gender Pegawai KPP Pratama Pare**



**Data per 31 Desember 2024*

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi selama periode 2024. Adapun sistematika laporan ini dibagi dalam empat bab utama yang mencakup seluruh aspek yang relevan. Berikut adalah rincian sistematika laporan:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang serta penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang menjadi fokus dalam laporan ini. Adapun rincian sub bab dalam BAB I adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan alasan dan urgensi disusunnya laporan kinerja ini. Latar belakang berisi informasi yang melatarbelakangi penyusunan laporan, serta pentingnya melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi dalam rangka perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi utama organisasi, serta menjelaskan bagaimana struktur organisasi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II: Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan mengenai perencanaan kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi dalam periode yang dilaporkan, termasuk perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja untuk tahun 2024. Sub bab dalam BAB II adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

Sub bab ini menjelaskan tentang rencana jangka panjang dan strategi yang disusun untuk mencapai visi dan misi organisasi. sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Di sub bab ini, dibahas mengenai proses penyusunan perjanjian kinerja yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam menjalankan tugasnya.

BAB III: Akuntabilitas Kinerja

Bab ini fokus pada akuntabilitas kinerja yang meliputi berbagai aspek yang mendukung penilaian atas pencapaian kinerja organisasi, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sub bab dalam BAB III adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menguraikan mengenai hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode yang dilaporkan. Capaian kinerja ini mencakup indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditargetkan.

2. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menjelaskan mengenai penggunaan anggaran selama periode yang dilaporkan, termasuk perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

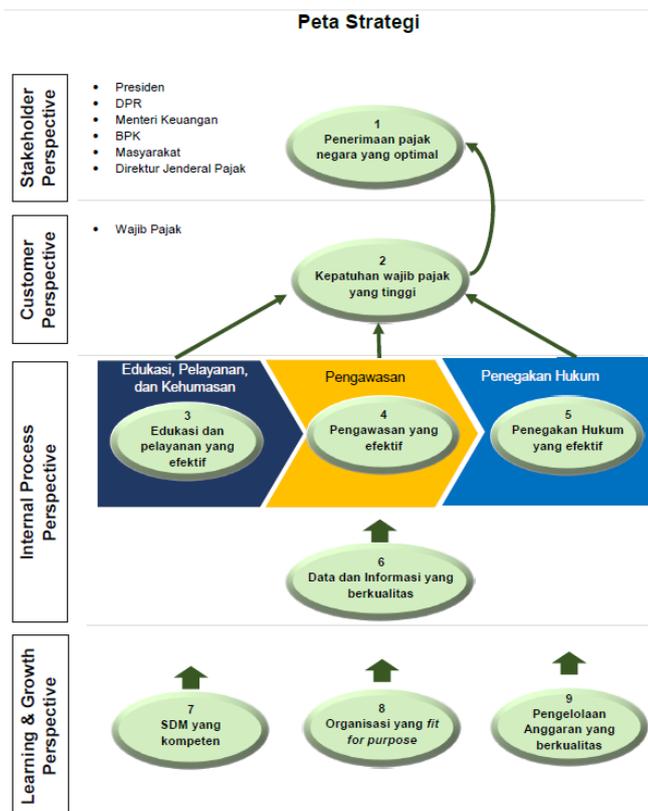
- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN,
- g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Penerimaan negara yang optimal
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien:

- Organisasi dan SDM yang optimal
- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

PETA STRATEGI



B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahun 2024 KPP Pratama Pare selain mempunyai target penerimaan sebesar Rp964.278.674.000,00 juga memiliki target penyelesaian kinerja lainnya, yang secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Kode	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%

	efektif	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

KPP Pratama Pare merupakan salah satu KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, dengan diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di daerah 2 (dua) kabupaten tersebut di atas. Keseluruhan target sasaran program/kegiatan sebagaimana di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pare Nomor: PK-19/WPJ.12/2024 tanggal 31 Januari 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Realisasi Target Kinerja Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				101,04
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,04
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,36	102,36
<i>Customer Perspective</i>				100,22
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,27
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,57%	100,57
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,16
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,16%	100,16
<i>Internal Process Perspective</i>				118,77
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			116,46
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,91%	112,91
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,60%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,40
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,25%	119,25
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,63%	118,63
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,35%	114,35
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	91,06%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00

8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	74,96%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,18
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,35
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	92,80	109,18
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,36	110,40
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,08

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	2022	2023	2024
Nilai NKO	112.15%	112.67%	109,08

Meskipun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023, namun di Tahun 2024 kinerja KPP Pratama Pare lebih baik dikarenakan realisasi semua IKU telah melebihi dari target yang diberikan.

Pada tahun 2023, dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Pare, terdapat 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning, serta tidak ada IKU yang berstatus merah. IKU yang berstatus kuning yaitu "Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi" dengan capaian sebesar 94,28%.

Pada tahun 2024, dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Pare, seluruh IKU berstatus hijau yang menunjukkan bahwa dari seluruh target yang ditetapkan, KPP Pratama Pare dapat merealisasikan seluruh target yang diamanatkan

3. Upaya *Extra Effort* dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Di tengah ketidakpastian geopolitik, tidak terulangnya Program Pengungkapan Sukarela, serta terkoreksinya harga komoditas utama, Penerimaan pajak KPP Pratama Pare tahun 2024 masih tumbuh positif dibandingkan tahun 2023. Target penerimaan pajak yang terlampaui untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut merupakan bukti tingkat partisipasi Wajib Pajak yang meningkat dan bukti *effort* penggalan potensi pajak yang semakin fokus dan terarah. Dalam

rangka mencapai target penerimaan pajak dan target kinerja lainnya KPP Pare berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya pencapaian target Penerimaan
 1. Pengawasan pembayaran masa
 2. Pengawasan SP2DK yang sudah diterbitkan
 3. Pengawasan lebih intens kepada Wajib Pajak Bendahara Desa, *SMS last*, serta kerja sama dengan Itjen Kabupaten
 4. Monitoring LPSE dan koordinasi dengan Pemda/Satker pemegang DIPA
 5. Komunikasi intensif dengan maincon Bandara serta pemilik proyek
 6. Mengoptimalkan data-data yang ada di system (Approweb), seperti: data pemicu, data penguji, data keuangan, faktur pajak 000 dan sebagainya
 7. Menindaklanjuti Data Pemicu yang memiliki potensi terbesar
 8. Tindak lanjut data DSE yang memiliki potensi besar.
 9. Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait data pembayaran pajak pemenang lelang
 10. Melakukan penagihan dengan tindakan penagihan aktif dan persuasif
 11. Mempercepat proses pemeriksaan
- b. Upaya pelayanan kepada Wajib Pajak
Penggunaan aplikasi berbasis web, dengan alamat web <https://biolinky.co/p/pajakpare655> sebagai media untuk memberikan informasi tentang pelayanan perpajakan sekaligus media pelayanan kepada Wajib Pajak yang dapat dilayani secara online dan offline

4. Analisis Penyebab Keberhasilan

Secara umum capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 sangat baik yaitu dengan nilai NKO sebesar 109,08% dimana dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), semua IKU berstatus hijau, dan tidak ada IKU yang berstatus kuning maupun merah.

Beberapa hal yang dapat dicatat cukup berhasil adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,07%, antara lain ditunjang dengan kegiatan peningkatan dan pengawasan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, optimalisasi ekstensifikasi wajib pajak berkualitas, serta optimalisasi pemanfaatan data.

b) Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

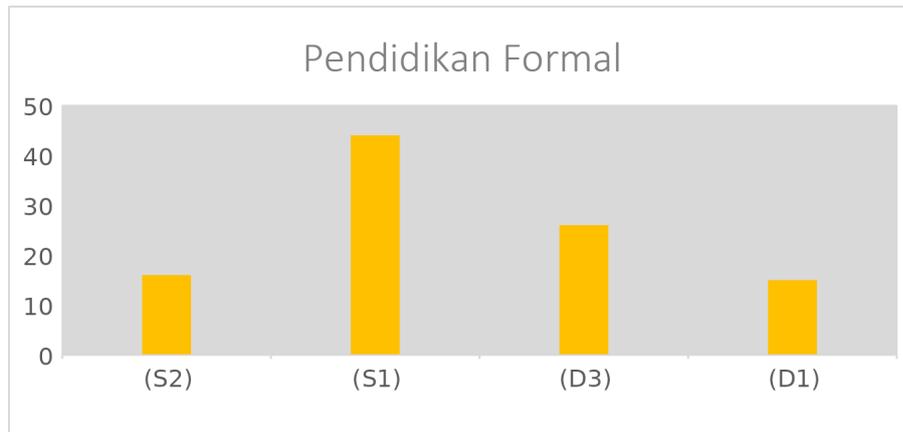
Pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Tahun 2024 berhasil melebihi target yakni sebesar 100.06% disebabkan karena beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, seperti program jemput bola berupa layanan penerimaan SPT di luar kantor baik di kelurahan atau kecamatan.

- c) Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Keberhasilan dalam mencapai *Effort* tahun 2024 sebesar 100.16% diantaranya adalah upaya penggalian potensi melalui analisa Laporan Keuangan dan beberapa sektor dominan. Selain itu pemeriksaan yang efektif dalam menghasilkan nilai pencairan yang cukup besar serta *deterent effect* yang signifikan.
- d) Tingkat Efektifitas Penagihan
Tingkat Efektifitas Penagihan pada tahun 2024 mencapai 91.06% dari target 75%. Tahun ini telah dilaksanakan penyampaian Surat Teguran sebanyak 7.066, Surat Paksa sebanyak 1.373, Penyitaan sebanyak 52, Surat Pemblokiran sebanyak 33 dan Lelang sebanyak 4 kali.
- e) Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Pajak
Tingkat Efektifitas Pemeriksaan pada tahun 2023 mencapai 108% dari target 80%. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan sebanyak 89 LHP dengan 86 LHP selesai tepat waktu. Surat Ketetapan Pajak yang terbit sebesar Rp 12.582.016.233 dan yang disetujui Wajib Pajak sebesar Rp 9.046.239.322

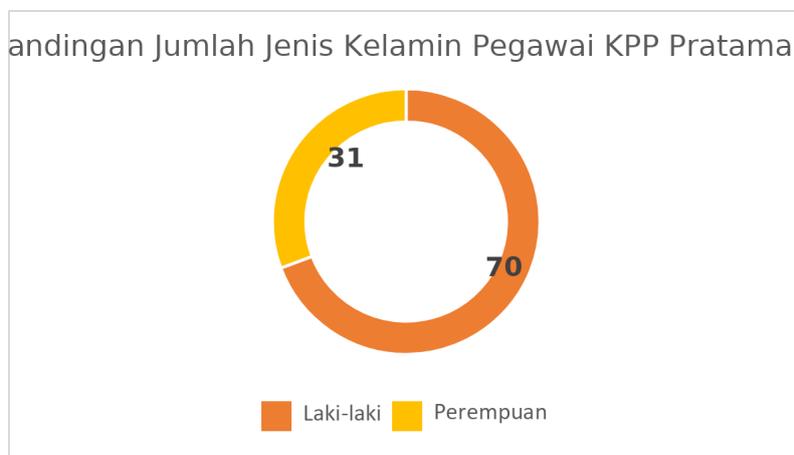
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Total pegawai KPP Pratama Pare tahun 2024 adalah sebanyak 101 pegawai dengan kategori sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH	%
STRUKTURAL		88	87,13%
1	Eselon 3 Kepala Kantor	1	0,99%
2	Kepala Seksi / Subbag / KP2KP	11	10,89%
3	Account Representative	38	37,62%
4	Juru Sita	2	1,98%
5	Bendaharawan	1	0,99%
6	Sekretaris	1	0,99%
7	Pelaksana	34	33,66%
FUNGSIONAL		13	12,87%
1	Pemeriksa Pajak Muda	1	0,99%
2	Pemeriksa Pajak Pertama	1	0,99%
3	Pemeriksa Pajak Penyelia	1	0,99%
4	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	1	0,99%
5	Pemeriksa Pajak Pelaksana	3	2,97%
6	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1	0,99%
7	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	1	0,99%
8	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	4	3,96%
TOTAL		101	100,00%



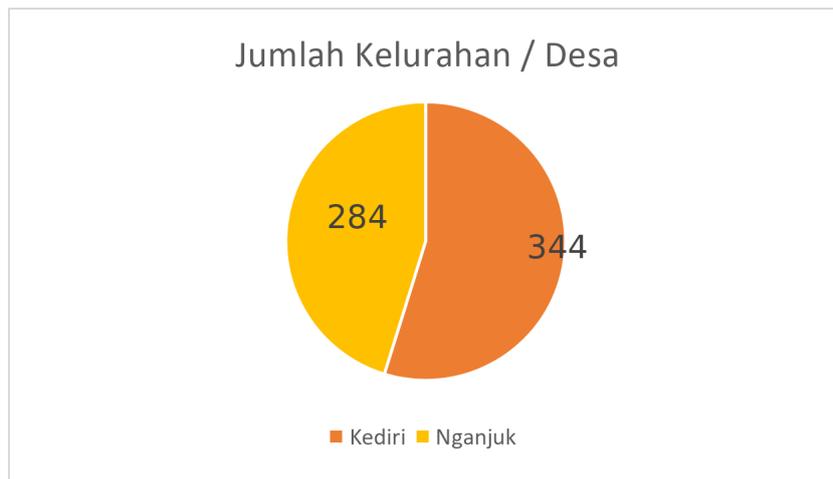
Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai KPP Pratama Pare adalah dari Sarjana Strata 1 yang mencakup 43,56% dengan total pegawai yaitu sejumlah 44 (empat puluh empat) pegawai.



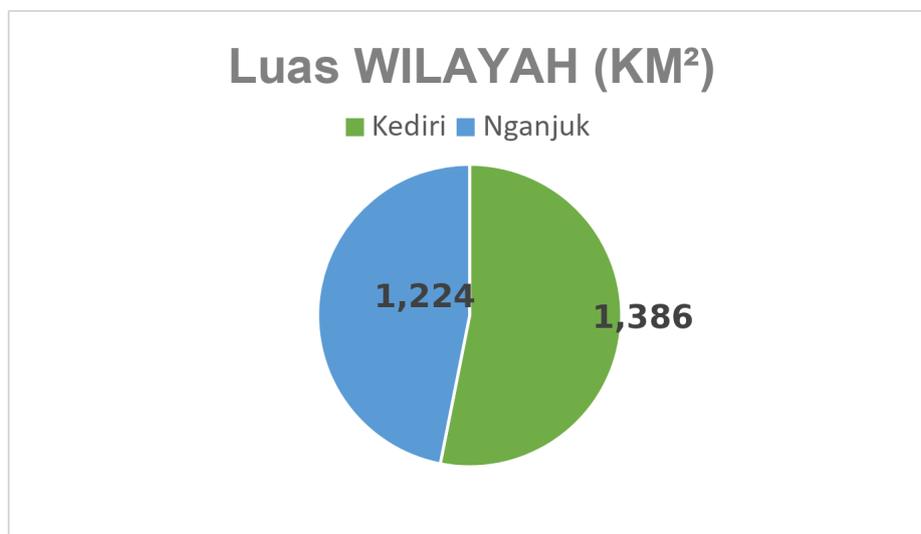
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan adalah 7:3, atau 70 pegawai merupakan laki-laki dan 31 pegawai merupakan perempuan.

Dari keseluruhan pegawai tersebut tersebar dalam beberapa fungsi, diantaranya fungsi pengawasan Wajib Pajak Strategis dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 500 WP dengan jumlah 5 AR dan fungsi pengawasan Wajib Pajak kewilayahan yang meliputi 33 AR.

Fungsi pengawasan atas Wajib Pajak kewilayahan bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak kewilayahan maka didapat perbandingan sebagai berikut:



Perbandingan Kelurahan / Desa : Jumlah AR Kewilayahan (628:33) adalah 19,03 kelurahan/desa per AR Kewilayahan



Perbandingan Kelurahan / Desa : Jumlah AR Kewilayahan (2.748 km²:33) adalah 83.3 km² kelurahan/desa per AR Kewilayahan

Untuk fungsi pelayanan terdapat 28 pegawai, terdiri dari 18 pegawai di seksi Pelayanan, 6 fungsional penyuluh, dan 4 pegawai di KP2KP. Bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak, permohonan Wajib Pajak serta luas wilayah, maka dapat dikatakan masih belum memadai.

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah WP Baru 2024	71.264
2.	Jumlah WP PKP 2024	204
3.	Jumlah WP PBk 2024	258
4.	Jumlah SPT dilaporkan tahun 2024	92.479

Angka-angka tersebut di atas belum termasuk dengan pelayanan yang membutuhkan visit ke lapangan dan layanan konsultasi seperti:

- Permohonan sertifikat elektronik,
- Konsultasi helpdesk,
- Konsultasi per telepon,
- Kelas pajak,
- dan lain-lain.

6. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program yang dilakukan KPP Pratama Pare dalam menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan dan tindak lanjut data internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak Lanjut Data Approweb (Data Keuangan, Data Penguji, Data Pemicu, Data CRM, • Tindak Lanjut data Kanwil (Data CTTOR, Joint Program) • Data Faktur Pajak 000
Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Pemda/Satker pemegangDIPA, • Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait data pembayaran pajak pemenang lelang • Pengawasan pembayaran masa
Toko Bangunan, Properti, Industri Beras, Toko Emas, Proyek Bandara	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Laporan Keuangan • Analisa PPh Pot/Put
Visit dan Pengamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut pencarian data Internet dan KPDL

7. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Prioritas Risiko	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko			
		Rencana Mitigasi Risiko		Output	Realisasi s.d. Triwulan IV
1.	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	a.	Menyelenggarakan IHT Pengawasan Wajib Pajak kepada AR	a. Kegiatan	100%
		b.	Meningkatkan pengawasan dan kerja sama dengan Instansi terkait serta memberikan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	b. Kegiatan	100%
2.	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	a.	Pembentukan Komite Kepatuhan	a. Surat Keputusan	100%
		b.	Pelaksanaan Sidang Komite	b. Kegiatan	100%
		c.	Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	a. Kegiatan	100%

		d.	Rapat pembahasan AR dan FPP atas temuan pemeriksaan Wajib Pajak (gelar perkara)	b.	Kegiatan	100%
3.	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	a.	Sosialisasi dan Himbauan kepada Wajib Pajak	a.	Kegiatan	100%
		a.	Melakukan penyuluhan WP dengan cara SMS Blast	a.	Kegiatan	100%
4.	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	a.	Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan baik Rapat Pembinaan 2b dan 2c	a.	Kegiatan	100%
		b.	Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi	b.	Kegiatan	100%
		c.	Memasang Banner, Poster Anti Gratifikasi di Ruangan	c.	Kegiatan	100%
		d.	Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ke Pegawai	d.	Kegiatan	100%
5.	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	a.	Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan baik Rapat Pembinaan 2b dan 2c		Kegiatan	100%
		b.	Melaksanakan Kegiatan Knowing Your Employee (KYE)		Kegiatan	100%
		c.	Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ke Pegawai		Kegiatan	100%

8. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi ke depan untuk menurunkan kemungkinan risiko dan dampak yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran strategis KPP Pratama Pare adalah sebagai berikut:

Prioritas Risiko	Kejadian Risiko	Opsi Mitigasi Risiko		Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
1.	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan dan dampak	a.	Menyelenggarakan IHT Pengawasan Wajib Pajak kepada AR	Kegiatan	2	sepanjang tahun 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II 2. Kepala Seksi Pengawasan III
			b.	Meningkatkan pengawasan dan kerja sama dengan Instansi terkait serta memberikan edukasi terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	Kegiatan	2	sepanjang tahun 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan II 2. Kepala Seksi Pengawasan III
2.	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Mengurangi kemungkinan dan dampak	a.	Sosialisasi dan Himbauan kepada Wajib Pajak	Kegiatan	12	sepanjang tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan

			b.	Melakukan penyuluhan WP dengan cara WA Blast	Kegiatan	6	sepanjang tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan
3.	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	mengurangi kemungkinan dan dampak	a.	Pembentukan Komite Kepatuhan	Surat Keputusan	1	sepanjang tahun 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			b.	Pelaksanaan Sidang Komite	Kegiatan	4	sepanjang tahun 2024	Kepala Seksi Pengawasan I
			c.	Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	Kegiatan	4	sepanjang tahun 2024	1. Kepala Seksi Pengawasan III 2. Kepala Seksi
			d.	Rapat pembahasan AR dan FPP atas temuan pemeriksaan Wajib Pajak (gelar perkara)	Kegiatan	12	sepanjang tahun 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian 2. Kepala Seksi
4.	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	mengurangi dampak	a.	Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan baik Rapat Pembinaan 2b dan 2c	Kegiatan	12	sepanjang tahun 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			b.	Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi	Kegiatan	3	sepanjang tahun 2024	
			c.	Memasang Banner, Poster Anti Gratifikasi di Ruangan	Kegiatan	1	sepanjang tahun 2024	
			d.	Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ke Pegawai	Kegiatan	1	sepanjang tahun 2024	
5.	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	mengurangi dampak	a.	Melaksanakan Rapat Pembinaan setiap bulan baik Rapat Pembinaan 2b dan 2c	Kegiatan	12	sepanjang tahun 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
			b.	Melaksanakan Kegiatan Knowing Your Employee (KYE)	Kegiatan	1	sepanjang tahun 2024	
			c.	Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ke Pegawai	Kegiatan	1	sepanjang tahun 2024	

B. REALISASI ANGGARAN

Selain mempunyai target penerimaan sebesar Rp964.278.674.000,00, pada tahun 2024 KPP Pratama Pare juga memiliki target kinerja lainnya, salah satunya pelaksanaan penggunaan anggaran yang berkualitas, yang terinci sebagai berikut:

KET	JENIS BELANJA			TOTAL
	PEGAWAI	BARANG	MODAL	
PAGU	777.362.000	5.584.750.000	97.539.000	6.459.651.000
REALISASI	758.531.000	5.298.783.440	97.539.000	6.154.853.440
PERSENTASE	97,58%	94,88%	100,00%	95,28%

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Pare kami buat dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kami pada beberapa tahun berikutnya. Laporan kinerja ini merupakan cerminan tanggung jawab kami dalam menyukseskan program kerja Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekaligus sebagai gambaran proses kerja yang dilaksanakan oleh pegawai KPP Pratama Pare.

Secara umum kinerja KPP Pratama Pare pada tahun 2024 sangat baik tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi yaitu sebesar 109,08%. Dengan pencapaian penerimaan pajak sebesar 100,07%. KPP Pratama Pare berhasil mencapai seluruh target IKU yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang antara lain:

1. Tetap fokus memenuhi capaian kinerja yang telah mencapai tahun depan. Agar masing-masing pegawai tidak hanya fokus memenuhi IKU masing-masing tetapi juga IKU Kantor. Untuk itu diperlukan kolaborasi untuk mencapai hal tersebut.
2. Meningkatkan pengamanan penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) melalui pengawasan pembayaran, penyetoran, pelaporan perpajakan, pemberian fasilitas perpajakan, kegiatan ekstensifikasi perpajakan dan penelitian serta tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
3. Meningkatkan pengamanan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) melalui pengawasan WP sektoral prioritas, fokus kegiatan pemeriksaan, fokus kegiatan penagihan, fokus kegiatan pengamanan penerimaan PBB, dan Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

Kediri, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pare,



Ditandatangani secara elektronik
Okto Syamsu Rizal